






**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
KELAS 1A**



RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2027

 (0561) 734100

 Jln. Sultan Abdurrahman No. 89

 www.pn-pontianak.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Revisi Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah pedoman dalam menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2027.

Revisi Rencana Kinerja Tahun 2026 dapat selesai dengan baik tidak terlepas dari kerjasama semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan RKT Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun Anggaran 2027 ini, untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sumbangan pemikiran dan tenaga sehingga Rencana Kinerja Tahun 2027 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dapat disusun.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2027 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat kami harapkan sebagai penyempurnaan penyusunan RKT di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kinerja Tahunan ini dapat menjadi tolak ukur serta acuan bagi kita semua terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2027. Semoga semua langkah dan upaya kita selalu mendapat bimbingan dan Ridho dari Allah SWT.



Pontianak, 26 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
BAB II	3
RENCANA KINERJA TAHUNAN	3
BAB III	20
PENUTUP	20



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Sebagai bagian dari manajemen kinerja, perencanaan kinerja menjadi kunci utama yang harus menjadi perhatian dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaanrenstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi melalui kegiatan tahunan. Penyusunan dokumen dilakukan selaras dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Tambahan, dan target yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan.

Dalam SAKIP terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Capaian Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah salah satu sub komponen yang harus ada dari komponen Perencanaan Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.

RKT Tahun 2027 ini merupakan bagian dari rencana implementasi program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dengan harapan semua kegiatan



menjadi terarah dan terukur untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Instansi. Penyusunan Revisi RKT Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Revisi RKT Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2026 adalah memberikan gambaran langkah – langkah atas program dan kegiatan yang menjadi target kinerja di tahun 2027, dengan harapan dapat memberikan informasi rencana kinerja yang terukur kepada pemberi mandat maupun unit atas kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA di tahun 2027.



BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam rencana strategis. Di dalam rencana kinerja, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program utama adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut adalah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Hal ini dalam rangka harmonisasi / keselarasan mulai dari RPJMN, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan penetapan Kinerja (PK).

Beberapa pengertian yang terkait dengan RKT adalah :

1. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Sasaran harus sesuai dengan uraian yang ada dalam dokumen Renstra atau RKT dari instansi pemerintah yang bersangkutan;
2. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, berupa output / keluaran maupun outcome / hasil;
3. Indikator kinerja *output* / keluaran adalah sesuatu berupa produk / jasa yang terukur sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
4. Indikator *outcome* / hasil adalah keluaran yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2027 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah sebagaimana tergambar pada matriks berikut :

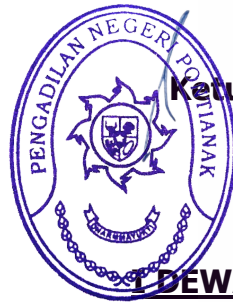
RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2027
NO. 276/KPN.W17-U1/OT1.6/I/2026
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%
2.		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
3.		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
4.		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
5.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
6.		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%
7.		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90%

8.		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%
9.		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	5%
10.		Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%
11.		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
12.		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
13.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,9
14.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
15.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	95
16.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	95
17.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85

18.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	70
19.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Tabel 1 Rencana Kinerja PN Pontianak Kelas 1A Tahun 2027

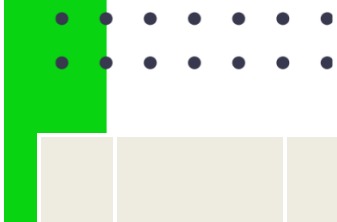


Pontianak, 26 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

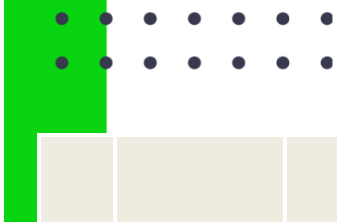
DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2027 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program Tahun 2027	Kegiatan Tahun 2027	Indikator Kegiatan Tahun 2027	Target Tahun 2027	Anggaran Tahun 2027
1.	Mewujudkan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I A yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan	Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu	92	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	92%	92%	93%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretaria tan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretaria tan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	2 Layanan	Rp. 14.843.872.00,-
		100		Persentase penyediaan/pe ngiriman salinan putusan tepat	100%	100%	100%	100%	100%						
														50 perkara	

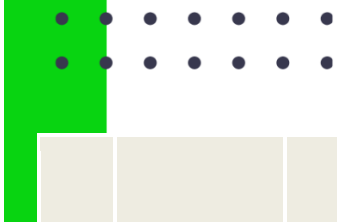


					waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak						Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	800 perkara	Rp. 39.416.000,-
													Perkara Pidana yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	80 perkara	Rp. 229.220.000,-
													Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama di Wilayah Tengah		Rp. 64.680.000,-
			100		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan	100%	100%	100%	100%	100%			Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	220 kegiatan	Rp. 4.400.000,-

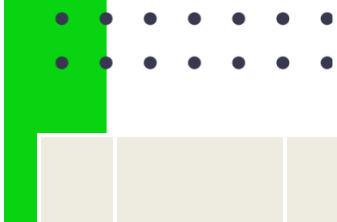


					tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak								(Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah)		
													Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama (Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah)	260 kegiatan	Rp. 5.200.000,-
													Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama (Perkara	35 kegiatan	Rp. 700.000,-

		Pemanfaatan mekanisme alternatif penyelesaian perkara	91		Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90%	90%	91%	91%	92%			Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	5 perkara	Rp. 229.220.000,-
			10		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	5%	5%	10%	10%	10%			Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	5 perkara	Rp. 229.220.000,-
			6		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	6%	6%	6%			Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretaria tan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	2 Layanan	Rp. 14.843.872.000,-
													Pengadaan Sarana dan	6 Unit	Rp. 30.000.000,-

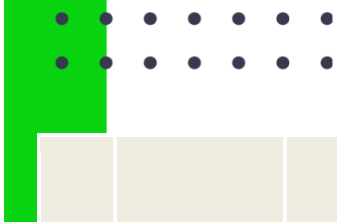


															Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		
		Penerapan teknologi digital dalam layanan hukum	100		Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%					Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretaria tan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	2 Layanan	Rp. 14.843.872.000,-
															Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	6 Unit	Rp. 30.000.000,-



			100		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%			Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretaria tan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	2 Layanan	Rp. 14.843.872.000,-
													Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	6 Unit	Rp. 30.000.000,-
			100		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%			Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretaria tan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	2 Layanan	Rp. 14.843.872.000,-
													Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan	6 Unit	Rp. 30.000.000,-

													Mahkamah Agung		
2.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap tata Kelola administrasi melalui pelaksanaan administrasi yang pasti, transparan dan akuntabel	Peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil.	3,90	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretaria tan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretaria tan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	2 Layanan	Rp. 14.843.872.000,-
			71	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	71	71	71	71		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		
			95		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan kerja	95	95	95	95	95	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	993 Perkara	Rp. 389.066.000,-



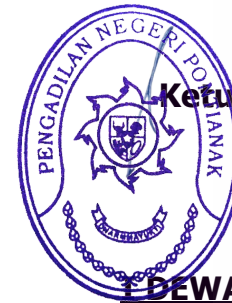
				Pengadilan (DIPA 01)											
			95	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan kerja Pengadilan (DIPA 03)	95	95	95	95	95						
			85	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	80	85	85	88	88						
			70	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	70	70	70	70	70						

			3,05		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,00	3,05	3,05	3,10					
--	--	--	------	--	--	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--

Tabel 2 Tabel Kinerja dan Pendanaan Revisi RKT Tahun 2027

Keterangan :

 = target tahun berjalan



Pontianak, 26 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA



BAB III


PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan mediasi untuk menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional sehingga dapat membantu pencapaian pelaksanaan program. Dan juga dapat menjadi suatu *performance agreement* sehingga memudahkan proses pengukuran kinerja, dapat membantu untuk monitoring dan mengevaluasi kegiatan, serta dapat membantu menetapkan rencana kinerja periode berikutnya.




RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2027 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

 Jln. Sultan Abdurrahman No. 89, Pontianak

 (0561) 734 100, FAX (0561) 763 214, 763 196

 pengadilannegeriptk@gmail.com

 0813 5048 5634 (Layanan Pengaduan)